

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 TENTANG PENGETATAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP KEJAHATAN LUAR BIASA KORUPSI, NARKOTIKA DAN TERORISME



Diajukan Oleh :

ALBERTO CHANDRA

N P M	: 100510302
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program kekhususan	: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum (PK2)

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2013**

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 TENTANG PENGETATAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP KEJAHATAN LUAR BIASA KORUPSI, NARKOTIKA DAN TERORISME



Diajukan Oleh :

ALBERTO CHANDRA

N P M	: 100510302
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program kekhususan	: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum (PK2)

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2013**

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 TENTANG PENGETATAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP KEJAHATAN LUAR BIASA KORUPSI, NARKOTIKA DAN TERORISME



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

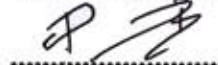
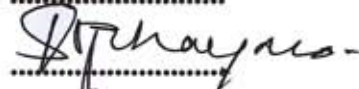
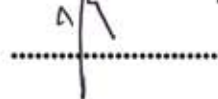
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 21 Januari 2014
Tempat : Ruang Dosen Lantai II

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. Paulinus Soge, SH., M.Hum.
Sekretaris : Ch. Medi Suharyono, SH., M.hum.
Anggota : G. Aryadi, SH., MH.

Tanda Tangan


.....

.....

.....

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta,


Dr. X. Sari Murti Widiyastuti, S.H. M.Hum.

HALAMAN MOTO

Ada lebih dari seribu sebab untuk menyerah, namun cukup dengan satu alasan untuk bangkit.

Bersukacitalah dalam Pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa (roma 12 : 12)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan hukum/skripsi ini kupersembahkan
untuk mereka yang tersayang dan tercinta :

Sang Juruselamatkanku Yesus Kristus,
Ayahandaku Hawel dan Bundaku Nuriyati,
Kakakku Florensia Octaviani, dan Adikku Bernardo Van Christian.

Kekasihku Fransiska Elsita

Keluarga Besarku

dan

Almamaterku Universitas Atma Jaya Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul tinjauan yuridis terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dalam hal pengetatan pemberian remisi terhadap kejahatan luar biasa korupsi, narkoba dan terorisme dengan lancar. Dalam penulisan skripsi penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Hawel, S.Pd, MM, Ph.D dan Nuriyati, S.Pd, MM selaku ayah dan ibu penulis yang senantiasa memberi dukungan baik moril maupun materil serta doa kepada penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
2. Florensia Octaviani dan Bernardo Van Christian Selaku kakak dan adik yang tidak lelah dalam memberikan semangat kepada penulis untuk terus berusaha dan pantang menyerah.
3. Fransiska Elsita selaku kekasih penulis yang telah memberikan doa dan selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Advent Roy Nanda yang telah memberikan bantuan tenaga dan operasional dalam sehingga skripsi ini dapat selesai.
5. G. Aryadi, SH, MH selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan kesempatan dan masukan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan lancar.
6. Kepada semua teman-teman Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan dukungan kepada kami penulis, serta kepada semua pihak

yang telah membantu yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan berupa doanya, sehingga pembuatan skripsi ini dapat terselesaikan.

Akhir kata semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi perkembangan bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan peradilan serta penyelesaian sengketa hukum pada khususnya. Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi masih jauh dari sempurna untuk itu penulis menerima saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan kearah kesempurnaan.

Penulis,

ABSTRACT

LEGAL REVIEW OF THE GOVERNMENT REGULATION NUMBER 99 OF 2012 IN TERMS OF TIGHTENING GRANTING REMISSION TO EXTRAORDINARY CRIMES OF CORRUPTION, NARCOTICS AND TERRORISM

ALBERTO CHANDRA

100510302

This research titled legal review of Government Regulation Number 99 Year of 2012 in terms of tightening granting remission to exceptional crimes of corruption, narcotics and terrorism. This research aims to determine whether the Government Regulation Number 99 Year of 2012 in terms of tightening granting remission to exceptional crimes of corruption, narcotics and terrorism against the principle of *equality before the law*. The type of research conducted was a normative legal research, which focuses on the positive legal norms in the form of legislation. This research was conducted in Class IIA Penitentiary Pakem. The results showed that the principle of equality before the law should be viewed as general justice is for the Indonesian people, so the Government Regulation Number 99 Year of 2012 has reflected the national sense of justice. Government Regulation Number 99 Year of 2012 in general has reflected the national sense of justice, however, to note that inmates still have the same rights as other inmates due to protection by the Indonesian constitution, particularly Article 27, paragraph (1), 28D paragraph (1) and 28H paragraph (2) of the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945, so that the provisions of Article 34A paragraph 2 in conjunction with Article 34A, paragraph 1 of Government Regulation No. 99 Year of 2012, which has closed the opportunity for inmates to obtain remission should be revisited, so as to achieve a sense of justice that approach true justice.

*Keywords: Government Regulation Number 99 Year of 2012,
Remission, Extraordinary Crime, Equality Before The Law.*

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 TENTANG PENGETATAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP KEJAHATAN LUAR BIASA KORUPSI, NARKOTIKA DAN TERORISME

ALBERTO CHANDRA
100510302

Penelitian ini berjudul tinjauan yuridis terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dalam hal pengetatan pemberian remisi terhadap kejahatan luar biasa korupsi, narkoba dan terorisme. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dalam hal pengetatan pemberian remisi terhadap kejahatan luar biasa korupsi, narkoba dan terorisme bertentangan dengan asas equality before the law. Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yang berfokus pada norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan. Penelitian dilakukan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pakem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prinsip *Equality Before the Law* harus dipandang sebagai keadilan secara umum yaitu bagi masyarakat Indonesia, sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 telah mencerminkan rasa keadilan nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 secara umum telah mencerminkan rasa keadilan nasional, namun perlu diperhatikan bahwa narapidana tetap memiliki hak yang sama seperti narapidana lainnya karena mendapat perlindungan oleh konstitusi Indonesia khususnya Pasal 27 ayat (1), 28 D ayat (1) dan 28 H ayat (2) Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945, sehingga ketentuan Pasal 34A ayat 2 junto Pasal 34A ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang telah menutup peluang bagi narapidana untuk mendapat remisi harus di tinjau kembali, sehingga akan mencapai suatu rasa keadilan yang mendekati keadilan yang sejati.

*Kata kunci: Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012,
Remisi, Kejahatan Luar Biasa, Equality Before The Law.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsef.....	10
G. Metode Penelitian.....	12
BAB II : EKSISTENSI ASAS <i>EQUALITY BEFORE THE LAW</i> DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 TENTANG PENGETATAN PEMBERIAN REMISI.	

A. Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor

99 Tahun 2012.....	18
1. Pengertian Umum.....	18
2. Remisi sebagai suatu hak narapidana.....	20
3. Jenis-Jenis Remisi.....	22
4. Syarat Pemberian Remisi.....	27
5. Tata Cara Pemberian Remisi.....	31

B. Pengetatan Pemberian Remisi Terhadap Kejahatan Luar Biasa

Korupsi, Narkotika dan Terorisme.....	33
1. Pengertian Umum Tindak Pidana Korupsi, Narkotika dan Terorisme.....	33
2. Tindak Pidana Korupsi, Narkotika dan Terorisme Sebagai Suatu Kejahatan Luar Biasa.....	40
3. Tinjauan Hukum Korupsi.....	41
a. Faktor-faktor Pemicu Tindak Pidana Korupsi.....	41
b. Ciri-ciri Tindak Pidana Korupsi.....	42
c. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi.....	46
4. Tinjauan Hukum Narkotika.....	50
a. Jenis-jenis Narkotika.....	50
b. Faktor-faktor Pemicu tindak pidana narkotika.....	52
c. Unsur-unsur Narkotika.....	55
5. Tinjauan Hukum Terorisme.....	58
a. Kekhususan Tindak Pidana Terorisme.....	58

b. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Terorisme dalam	
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.....	61
c. Unsur-Unsur dan Karakteristik Tindak Pidana Terorisme.....	66
C. Eksistensi Asas <i>Equality Before The Law</i> dalam Peraturan	
Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.....	69
BAB III : PENUTUP	
a. Kesimpulan.....	76
b. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN.....	82

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum / skripsi ini merupakan karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan hukum ini terbukti merupakan hasil plagiasi dari penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Desember 2013

Yang Menyatakan,

ALBERTO CHANDRA